

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Selain persiapan aparat pemerintah, kesiapan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal juga sangat penting. Pembangunan daerah harus disesuaikan dengan potensi dan aspirasi masyarakat setempat. Jika prioritas pembangunan daerah tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, pemanfaatan sumber daya yang ada dapat menjadi tidak optimal, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Amalia,2012).

Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan karakteristik daerah yang mereka kelola, namun pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah, serta masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal anggaran dan kebijakan (Supian & Susila, 2023).

Potensi daerah merujuk pada kerangka pembangunan yang mencakup kemampuan, kekuatan, dan kapasitas ekonomi suatu wilayah untuk memperoleh manfaat ekonomi, termasuk potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Serupa dengan usulan potensi geografis dan infrastruktur

lainnya, tantangan kompetitif yang memengaruhi perekonomian daerah setelah pemberlakuan otonomi diartikan sebagai panduan untuk meningkatkan daya saing berbagai daerah di Indonesia. Dalam upaya mengembangkan kemandirian setiap daerah, optimalisasi potensi lokal menjadi suatu hal yang penting (Jaya, 2022).

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah tertentu yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang atau jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah (Zamida, 2017)

Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah tergantung oleh besarnya sumber daya alam yang telah dimanfaatkan, jumlah dan mutu sumber daya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan setiap pemerintah daerah harus mengetahui sektor basis yang menjadi prioritas dalam peningkatan pembangunan dan seberapa besar kontribusi sektor perekonomian terhadap pembangunan daerah (Rahmanta, 2015).

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pembangunan sektor pertanian yang memiliki peran strategis. Sektor pertanian tidak hanya berperan dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, dan bioenergi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, dan pendapatan masyarakat. Selain itu, praktik pertanian yang ramah lingkungan juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Peran strategis pertanian tersebut selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor ini (Lepa & Rachman, 2019).

Pentingnya sektor pertanian sebagai fokus utama dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis

terutama komoditas pangan, sangat ditekankan. Diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertanian dapat dilakukan secara terencana dan optimal, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia (Isbah & Iyan, 2016).

Subsektor tanaman pangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Komoditas tanaman pangan menjadi bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, menjadikannya strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kehadirannya menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga kesejahteraan ekonomi dan sosial negara ini sangat bergantung pada produktivitas dan ketersediaan tanaman pangan. Dengan demikian, pengembangan dan peningkatan produktivitas subsektor tanaman pangan menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan di Indonesia (Tuminem & Ferichani, 2018).

Subsektor tanaman pangan memiliki peran penting dalam mencapai swasembada pangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya subsektor tanaman pangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Subsektor ini berperan dalam penyediaan komoditas unggulan yang penting untuk pangan nasional. Dengan dukungan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan fokus meningkatkan produksi dan kualitas komoditas unggulan. Penguatan kelembagaan petani dan peningkatan akses pasar juga krusial untuk mencapai swasembada pangan. (Martadona & Leovita, 2019).

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan memiliki posisi strategis sebagai jalur utama penghubung Jakarta dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Daerah ini dapat dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan ketinggian. Pertama, dataran rendah dengan ketinggian 0-10 m dari permukaan laut yang mencakup kecamatan seperti Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, dan lainnya di sepanjang pantai utara Jawa. Kedua, dataran tinggi dengan ketinggian 11-130 m dari permukaan laut.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2018-2022.

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1. Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	4.531,85	4.485,18	4.563,11	4.559,21	4.741,55
2. Pertambangan dan penggalian	431,17	416,88	417,12	445,47	445,26
3. Industri Pengolahan	6.662,38	6.889,05	6.809,81	6.984,48	7.312,38
4. Pengadaan Listrik dan Gas	53,00	56,63	54,01	61,28	62,24
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,57	28,36	33,19	36,17	37,06
6. Konstruksi	3.936,18	4.046,87	3.869,18	4.018,35	4.017,01
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	5.011,42	5.242,93	4.874,19	5.036,25	5.151,91
8. Transportasi dan Pergudangan	2.446,49	2.674,48	2.574,72	2.585,90	2.834,17
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.160,83	1.224,37	1.107,58	1.095,73	1.179,80
10. Informasi dan Komunikasi	1.035,69	1.103,91	1.440,25	1.510,60	1.602,69
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.191,87	1.286,47	1.303,60	1.365,38	1.376,98
12. Real Estat	775,73	847,61	858,27	938,10	982,82
13. Jasa Perusahaan	294,35	321,66	288,51	311,93	343,00
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	870,71	903,40	862,30	854,35	834,58
15. Jasa Pendidikan	1.757,89	1.952,55	2.100,66	2.102,32	2.164,28
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	711,63	794,03	786,74	844,74	887,38
17. Jasa lainnya	1.264,07	1.393,72	1.360,82	1.377,24	1.550,66
Produk Domestik Regional Bruto	32.161,84	33.668,10	33.304,05	34.127,52	35.523,78

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon 2018-2022, (BPS Kabupaten Cirebon, 2023)

Sektor pertanian merupakan kontribusi tertinggi kedua dalam perekonomian daerah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data PDRB atas harga konstan 2010, sektor ini menunjukkan kontribusi signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penopang ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar penduduk. Peningkatan produksi komoditas pertanian telah mendorong pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa sektor ini adalah salah satu pilar utama yang mendukung stabilitas dan kemajuan PDRB Kabupaten Cirebon. Selain itu, sektor ini juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian di Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar untuk terus berkembang, oleh karena itu optimalisasi sektor pertanian menjadi kunci dalam strategi pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Sungkawa dkk (2018), pada tahun 2011-2015 Kabupaten Cirebon memiliki komoditas unggulan seperti padi. Komoditas padi sawah tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Cirebon kecuali Kecamatan Waled, Pasaleman, Astanajapura, Grege, Gempol, dan Ciwaringin. Namun, berdasarkan wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, pada tahun 2018 produksi padi mengalami peningkatan menjadi 582.113 ton dan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penggunaan teknologi pertanian dan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, padi tetap menjadi salah satu komoditas utama yang mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan mengembangkan komoditas unggulan ini guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon.

Peningkatan produksi telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Meskipun berada di bawah sektor industri pengolahan, sektor pertanian terus berperan sebagai salah satu pilar utama yang mendukung stabilitas dan kemajuan PDRB. Dengan memperkuat sektor ini, Kabupaten Cirebon dapat terus mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Peran sektor pertanian ini tidak hanya penting dalam penyediaan bahan pangan, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan. Pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat daya saing Kabupaten Cirebon di tingkat nasional.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2018-2023.

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1. Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	2,37	-1,03	1,17	-0,09	4,00	-2,13
2. Pertambangan dan penggalian	2,48	-3,32	0,06	6,80	-0,05	-0,04
3. Industri Pengolahan	5,33	3,40	-1,15	2,56	4,69	5,38
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2,50	6,84	-4,62	13,46	1,56	4,52
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,60	6,75	17,03	8,98	2,46	6,96
6. Konstruksi	6,98	2,81	-4,39	3,86	0,03	-0,03
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3,26	4,62	-7,03	3,32	2,30	2,02
8. Transportasi dan Pergudangan	5,89	9,32	-3,73	0,43	9,60	16,88
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	5,47	-9,54	-1,07	7,67	7,64
10. Informasi dan Komunikasi	9,01	6,59	30,47	4,88	6,10	5,51
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,00	7,94	1,33	4,74	0,85	4,97
12. Real Estat	8,78	9,27	1,26	9,30	4,77	4,19
13. Jasa Perusahaan	8,57	9,28	-10,31	8,12	9,96	8,76
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,07	3,75	-4,55	-0,92	-2,31	7,38
15. Jasa Pendidikan	7,81	11,07	7,59	0,08	2,95	9,85
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	11,58	-0,92	7,37	5,05	4,90
17. Jasa lainnya	4,84	10,26	-2,36	1,21	12,59	13,35
Produk Domestik Regional Bruto	5,02	4,68	-1,08	2,47	4,09	4,85

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon 2018-2023, (BPS Kabupaten Cirebon, 2024)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon dalam sektor pertanian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,2 miliar Rupiah meskipun di tengah pandemi COVID-19. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki ketahanan dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi krisis. Meskipun kondisi pandemi menghadirkan tantangan baru bagi sektor pertanian, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon mampu menjaga ketahanan sektor pertaniannya dan

bahkan mencapai pertumbuhan yang positif. Hal ini memberikan gambaran bahwa sektor pertanian di daerah tersebut memiliki potensi yang kuat untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal maupun nasional.

Selain peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, sektor pertanian di Kabupaten Cirebon juga menunjukkan nilai fluktuasi yang mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi. Sektor pertanian mengalami penurunan nilai sebesar 3,40 miliar Rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, nilai sektor pertanian kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian memiliki ketahanan yang kuat, tetap rentan terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan kebijakan yang mendukung untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Tanaman pangan apa sajakah yang menjadi komoditas basis dan non basis yang ada di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pertumbuhan komoditas tanaman pangan di Kabupaten Cirebon?
3. Komoditas tanaman pangan apa sajakah yang menjadi unggulan di Kabupaten Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin didapat adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sektor basis dan non basis subsektor tanaman pangan setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon
2. Menganalisis pertumbuhan struktur ekonomi subsektor tanaman pangan di Kabupaten Cirebon
3. Menganalisis komoditas subsektor tanaman pangan unggulan di Kabupaten Cirebon

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti, sebagai bahan informasi yang memberikan gambaran tentang sektor basis dan non basis subsektor tanaman pangan di Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah, sebagai masukan untuk membuat kebijakan agar dapat meningkatkan perekonomian pertanian terutama sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Cirebon
3. Peneliti lain, sebagai referensi, informasi dan acuan dalam melihat permasalahan sektor basis dan non basis subsektor tanaman pangan di Kabupaten Cirebon